

DEMOKRASI ITU “RIBUT”

Oleh Nurcholish Madjid

Bahwa negara kita adalah negara demokrasi — itulah cita-cita kita semua — tentu tidak perlu lagi dipersoalkan. Cita-cita itu sudah menjadi pandangan para pendiri Republik, dan merupakan salah satu unsur dorongan batin mereka yang sangat kuat untuk berjuang merebut, mempertahankan dan kemudian mengisi kemerdekaan itu.

Tetapi tetap perlu ditegaskan bahwa dari satu sudut pandangan, demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis. Ia senantiasa bergerak atau berubah, kadang-kadang negatif (mundur), kadang-kadang positif (berkembang maju). Oleh karena itu seperti dikatakan oleh Willy Eichler (ideologi Partai Sosial Demokrat Jerman-SPD), demokrasi akhirnya menjadi sama dengan proses demokratisasi. Karena itu, suatu negara bisa disebut demokratis jika padanya terdapat proses-proses perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi, dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial, untuk mewujudkan nilai-nilai itu. *Check lists* yang dapat digunakan untuk mengukur maju-mundurnya demokrasi ialah sekitar seberapa jauh bertambah atau berkurangnya kebebasan asasi, seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Masing-masing dari ketiga pokok itu dapat dirinci lebih lanjut dalam kaitannya dengan berbagai bidang kehidupan perorangan dan kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, kebudayaan, akademis ilmiah), hukum, dan seterusnya.

Sudut pandang demokrasi sebagai kategori dinamis memungkinkan terjadinya hal yang dapat disebut ironis, seperti jika sebuah negara yang kini disebut (paling) demokratis — katakanlah Amerika Serikat — ustru akan dinilai tidak lagi demokratis jika ia menunjukkan gejala “kemandekan” dengan menghambat laju tuntutan dan pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi para warganya. Apalagi jika kepada kategori pengujian kedemokrasian negara itu, dimasukkan pula unsur seberapa jauh terlaksana dengan nyata prinsip kesamaan umat manusia, maka Amerika dan lain-lain negara Barat menjadi kurang demokratis dibandingkan dengan banyak negara “Dunia Ketiga.” Sebab di negara-negara Barat itu masih banyak tampak paham warna kulit atau rasialisme dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian dapat disebut bahwa suatu negara berkembang pun, dalam perspektif Eichler, mungkin harus dipandang sebagai “lebih demokratis” jika padanya terjadi proses-proses perkembangan kemajuan sejati dalam mewujudkan dan melaksanakan kebebasan berupa kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

Oleh karena itu, yang amat perlu diperhatikan dalam perspektif tentang demokrasi ialah pesan tentang pentingnya proses perkembangan, dan bahayanya kemandekan. Masyarakat demokratis cenderung ribut, tapi keributan itu, dinilai pasti lebih baik daripada ketenangan karena kemandekan.

Jika persoalan itu kita bawa ke negeri kita, maka kita harus melihat ada-tidaknya proses-proses menuju pada pelaksanaan *check lists* demokrasi tersebut. Berdasarkan itu barangkali dalam penglihatan Eichler, Indonesia harus digolongkan sebagai “negara demokrasi.” Dengan mengatakan negara kita demokratis kita menyisihkan ruang dan hak keabsahan bagi diri kita untuk betul-betul berpikir dan berperilaku demokratis, dan untuk menuntut dari semua orang agar berbuat serupa, khususnya dari mereka yang tergolong “penentu kecenderungan” (*trend makers*) dengan kekuasaan yang efektif. [❖]